

**FEMINISME PRESIDEN KOREA SELATAN PARK GEUN HYE DALAM
*TRUST POLITIC POLICY***



Oleh :

Medika Widilaksmira

NPM. 14430007

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik Dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi:

Feminisme Presiden Korea Selatan Park Geun Hye dalam *Trust Politic Policy* Disetujui

untuk Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

Persetujuan Pembimbing:

Pembimbing I


Setyasih Harini, S.IP, M.Si

NIPY. 0110.0266

Pembimbing II


Drs. GPH. Dipokusumo, M.Si

NIPY. 0111.0286

PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 30 Agustus 2019

Panitia Penguji Skripsi:

1. Ketua : Setyasih Harini, S.IP, M.Si

()

2. Sekretaris : Drs. GPH. Dipokusumo, M.Si

()

3. Penguji : Dra. Christy Damayanti, M.Si

()

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Dekan


Drs. Duddy Riyanto, M.Si

NIPY. 0191.0139

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanggungjawab di bawah ini:

Nama : Modika Widilaksmira

NPM : 14430007

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"Feminisme Presiden Korea Selatan Park Geun Hye

dalam Trust Politic Policy"

Merupakan hasil karya saya dan saya bertanggung jawab penuh terhadap skripsi ini.

Surakarta, 30 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Modika Widilaksmira

NPM. 14430007

ABSTRAK

Korea Selatan merupakan negara yang memiliki budaya patriarki tertinggi di dunia sekaligus peringkat paling rendah dalam hal kesetaraan gender. Setelah ibunya meninggal pada tahun 1974, Park sudah menjadi ibu negara untuk menemani ayahnya, Park Chung Hee bertugas. Tahun 1976, Park Chung Hee tewas terbunuh dan itu membuat Park dan kedua adiknya berusaha sendiri untuk menghidupi keluarganya. Setelah selama 17 tahun vakum dari dunia politik, kemudian, pada tahun 2013, Korea Selatan pertama kali memiliki Presiden perempuan. Park Geun Hye, perempuan pertama yang memimpin Korea Selatan. *Trust Politic Policy* adalah kebijakan yang dikeluarkan Park dalam masa pemerintahannya. Park juga mengeluarkan 3 pilar perdamaianya yang didalamnya mengutamakan perempuan dan anak-anak. Selain itu juga kebijakan Park lebih mengutamakan negosiasi daripada emosi. *Trust Politic Policy* ini akan saya kaitkan dengan teori Keamanan Nasional dan juga Feminisme. Keamanan Nasional di Korea Selatan mulai terganggu karena adanya kegiatan nuklir Korea Utara. Penelitian ini dibuat dengan metode kualitatif dengan mengkaji literatur dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Beberapa kali Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang membuat kawasan Semenanjung Korea merasa terancam, termasuk Korea Selatan yang merupakan negara tetangga paling dengan Korea Utara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Park ditujukan terutama untuk Korea Utara mengenai kegiatan nuklirnya yang bisa mengakibatkan Kawasan disekitarnya merasa terancam. Dalam *Trust Politic Policy* Park ingin mengubah zona konflik yang ada di Kawasan Semenanjung Korea menjadi zona Kepercayaan dengan menggunakan pendekatan feminisnya.

Kata kunci : Korea Selatan, Park geun Hye, *Trust Politic Policy*, feminisme.

ABSTRACT

South Korea is a country that has the highest patriarchy culture in the world and is the lowest rank in terms of gender equality. After her mother's death in 1974, Park has been the first lady to accompany her father, Park Chung Hee, on his duty. Park Chung Hee was killed in 1976 and it required Park and her two younger brothers or sisters to attempt to support their family's life. After 17-years political vacuum, South Korea had female president for the first time in 2013. Park Geun Hye is the first woman leading South Korea. *Trust Politic Policy* is the policy issued by Park during her reign. Park also issues 3 pillar of peace emphasizing on women and children. In addition, Park's policy also emphasizes more on negotiation than on emotion. This *Trust Politic Policys* will be associated with National Security and Feminism theories. National Security in South Korea began to be disrupted due to North Korea's nuclear activities. The research was made by qualitative methods by reviewing the literature and books relating to the research title. North Korea has conducted some nuclear trials threatening the security of Korea peninsula's area, including South Korea as the neighbor state closest to North Korea. The policy issued by Park is intended particularly to North Korea concerning its nuclear activity that can threaten surrounding areas. In *Trust Politic Policy*, Park wants to change the conflict zone existing in Korea Peninsula area into Trust zone using her feministic approach.

Keywords: South Korea, Park Geun Hye, *Trust Politic Policy*, feminism.

“MOTTO”

Sejatinya tidak ada wanita murahan, ia hanya lupa bahwa dirinya berharga.

-Inspiring Journal Indonesia-

Sukses itu harus melewati banyak proses bukan banyak protes.

-Merry Riana-

Life is a series of thousand tiny miracles, notice them.

-unknown-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Allah swt. Terimakasih sudah memberikanku kesempatan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, untuk segala kenikmatan yang telah Kau berikan selama mengerjakan skripsi ini. Thank You so much for always there, beside me.
2. Bapak, Ibu, Mbak Dias, Mas Bobby and my little one Arsy. Terimakasih untuk segala usaha yang sudah kalian berikan untukku yang masih selalu merepotkan. And now i did it. I love u all and always.
3. IREL'14 UNISRI. I love u guys so much. Semoga tetap bisa menjadi sodara yang solid biar kapan-kapan di group bisa ada acara reunion.
4. Teman kosku tercinta Mbak Amel, Mbak Hesty, Mbak Retno, Prisma, Mira, Desy, Nina. Terimakasih selalu mengingatkan skripsi di group kita. Terimakasih untuk tetap menjadi teman disegala kondisi.
5. Last but not least, to much people out there, yang selalu menanyakan skripsiku. Terimakasih sudah bertanya dan memberiku semangat. IM SO GLAD TO ANNOUCE THAT I DID IT NOW. YES I DID IT. THANKYOU.
6. And last, thankyou to myself. You work so hard and now tou did it guys. I LOVE YOU MY SELF.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya, skripsi dengan berjudul “Feminisme Presiden Korea Selatan Park Geun Hye dalam *Trust Politic Policy*”, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan penulis.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slmaet Riyadi. Pada skripsi ini dibahas tentang bagaimana Feminisme Presiden Korea Selatan Park Geun Hye dalam *Trust Politic Policy* untuk menangani ancaman nuklir dari Korea Utara. Selama proses penelitian skripsi ini, peneliti dibantu oleh berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Sutardi, M.App Sc, selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta
2. Drs. Buddy Riyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta
3. Ganjar Widhiyoya, S.IP, M.Si, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
4. Setyasih Harini S.IP M.Si. selaku pembimbing utama dalam skripsi saya dan yang selalu memberikan waktu dan saran untuk skripsi yang saya buat.
5. GPH. Dipokusumo, M.Si selaku pembimbing kedua saya dan yang banyak mensupport saya dan teman-teman IREL’14.
6. Halifa Haqqi, S.IP, M.Si selaku Pembimbing Akademik angkatan 2014 Hubungan Internasional UNISRI

7. Dra. Christy Damayanti, M.Si selaku dosen penguji skripsi.
8. Seluruh Dosen pengajar HI UNISRI.
9. Staff TU FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
10. Seluruh staff dan pegawai Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Surakarta, 30 Agustus 2019

Peneliti,

Medika Widilaksmira

NPM.14430007

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4

D. Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Dasar Teori.....	6
1. Konsep Feminisme.....	6
2. Keamanan Nasional (<i>National Security</i>).....	10
B. Penelitian Terdahulu	12
1. Motivasi Park Geun-Hye Menerapkan Kebijakan <i>Trust Politic</i> Dalam Menghadapi Korea Utara Tahun 2013-2016.....	12
2. Evolusi Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara : <i>Trust- Politic Policy</i> Park Geun-hye.....	19
C. Kerangka Berfikir.....	15
BAB III	18
METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Sumber Data.....	18
C. Objek Penelitian.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisa Data.....	20

1. Reduksi Data	20
2. Penyajian Data.....	21
3. Verifikasi Data	22
 BAB IV	 23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Terpilihnya Park Geun Hye.....	23
1. Latar Belakang Kehidupan.....	23
2. Karir Politik.....	24
3. Pemilihan Umum.....	25
B. Park Geun Hye dan Feminisme.....	27
C. Park Geun Hye dan <i>Trust Politic Policy</i>	29
1. <i>Trust-politic Policy</i> dan Konsep Keamanan Nasional	32
2. Park Geun-hye dan Kepedulian Terhadap Anak-anak dan Perempuan.....	34
D. Ancaman Program Nuklir Korea Utara Terhadap Korea Selatan.....	42
1. Bidang Ekonomi.....	42
2. Bidang Keamanan.....	43
3. Bidang Sosial Budaya.....	43
E. Sikap Korea Selatan Terhadap Aktivitas Nuklir Korea Utara.....	44
1. Periode Kim Dae-jang (1998-2003).....	45
2. Periode Roh Mou-Hyun (2003-2008).....	45
3. Periode Lee Myung-bak (2008-2013).....	45

4. Periode Park Geun-hye (2013-2017).....	46
F. Kegiatan Nuklir Korea Utara.....	46
1. Krisis Nuklir I Korea Utara.....	46
2. Krisis Nuklir II Korea Utara.....	47
3. Krisis Nuklir III Korea Utara.....	49
4. Krisis Nuklir IV Korea Utara.....	50
5. Krisis Nuklir V Korea Utara.....	52
BAB V.....	56
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

1. Prsentase Perolehan Suara Park Geun Hye dan Moon Jae In.....	26
2. Tabel 1: Trust-Building Process dalam administrasi Park Geun-hye.....	31
3. Gambar 1: Park Il-sung dan Kim Koo pada tahun 1949 sesaat sebelum pecahnya Perang Korea.....	47
4. Gambar 2 : Yongbyon Nuclear Research Facility/ fasilitas nukler Yongbyon dimana fasilitas ini terdeteksi oleh satelit Amerika Serikat setelah Korea Utara mengatakan komitmennya untuk menghentikan kegiatan nuklirnya.....	48
5. Gambar 3 : Peta posisi nuklir Yongbyon, dan beberapa posisi fasilitas nuklir yang dimiliki Korea Utara.....	50
6. Gambar 4 : Arah percobaan roket bermuatan nuklir Korea Utara dari tahun 1998 hingga 2017, percobaan senjatanya lebih banyak diarahkan ke Jepang dan Samudera Pasifik.....	51
7. Gambar 5: Pencitraan lokasi reaktor light water setelah Korea Utara meminta dukungan kepada Amerika Serikat untuk penggunaannya, menggantikan reaktor nuklir.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korea Selatan merupakan negara yang memiliki budaya patriaki tertinggi didunia sekaligus peringkat paling rendah dalam hal kesetaraan gender (Han & Chun. 2017: 245). Negara menjadi salah satu pendukung dalam diskriminasi gender pada dekage 90-an, dimana para laki-laki yang sudah menjalankan wajib militer mendapatkan poin tambahan dalam seleksi penerimaan pegawai negeri, penerimaan karyawan swasta dan sektor industrial di Korea Selatan, ini tentu merugikan para perempuan yang tidak diwajibkan menjalankan wajib militer, sekaligus membuat peluang para perempuan untuk dapat pekerjaan menjadi menurun(Han & Chun. 2017: 245).

Diskriminasi gender di Korea Selatan tidak hanya pada hal upah, kondisi kerja, kualitas kerja, dan keamanan kerja, melainkan juga dalam hal kemiskinan, kekerasan, dan ketidakadilan. Pada tahun 2001 Korea Selatan meluncurkan institusi negara yang diberi nama Kementerian Kesetaraan Gender, lalu pada 2005 menjadi Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, mencerminkan keberhasilan penghargaan atas perempuan di Korea Selatan. Selama negara Korea Selatan berdiri, belum ada seorang perempuan yang menjabat menjadi seorang presiden, baru pada tahun 2012, Park Geun-hye yang mencalonkan diri sebagai presiden melalui partai Seungri.

Pada pemilihan umum tahun 2012, Park berhasil mendapatkan suara mayoritas penduduk Korea Selatan dari berbagai daerah, lebih lebih pada provinsi Daegu dan Gyongbuk, mengalahkan pesaingnya Moon Jae-in. Park Geun-hye lahir pada Februari 1952 yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak biasa, mendapatkan pendidikan politik langsung dari ayahnya, Park Chung-hee, yang merupakan pemimpin pemberontakan pada 1961 dan mengambil alih jabatan tertinggi di Korea Selatan dari tahun 1963 hingga 1979 (Lee & Jalalzai. 2017:600).

Park Geun-hye menghabiskan masa kecilnya di *Blue House* sebagai seorang anak presiden. Pada 1974, ibunya, Yook Young-soo dibunuh, secara otomatis dalam pemerintahan Korea Selatan, Park Geun-hye yang merupakan anak pertama menjadi ibu negara (*first lady*) dan memegang posisi yang amat penting (Hanm & Heo. 2017:6). Tak berapa lama, tepatnya pada 1976, ayahnya, Park Chung-hee, juga dibunuh oleh tangan kanannya sendiri bernama Kim Jae-kyu. Setelah kejadian itu Park Geun-hye tidak terlihat dipublik hingga 17 tahun lamanya, memiliki dua orang adik dan perubahan drastis dalam hidupnya membuat Park Geun-hye depresi dan tertekan (Hanm & Heo. 2017:7).

Setelah mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terlebih dari para elit politik yang dekat dengan keluarganya, Park Geun-hye memulai karir politiknya dipartai Seungri sebagai anggota legislatif selama 14 tahun dan mencalonkan diri sebagai presiden Korea Selatan pada tahun 2012 hingga menjadi presiden mengalahkan Moon Jae-in.

Awalnya, masyarakat mengira Park Geun-hye merupakan presiden yang tidak menaruh perhatian pada isu-isu perempuan, bahkan ada yang menuduh

presiden Park memang presiden perempuan pertama Korea Selatan tetapi tidak dicerminkan dalam kebijakannya dan cenderung tidak demokrasi (Hanm & Heo. 2017:2). Jika diteliti lebih dalam, Park Geun-hye merupakan presiden yang memiliki paham feminisme (Lee & Jalalzai. 2017: 612), ini tercermin dari beberapa kebijakan yang diambil, seperti contoh; selama pemerintahannya, Park memfokuskan kebijakan untuk meningkatkan pekerja perempuan (*womens labour*), mengimplementasikan layanan publik pada *daycare* dan *childcare* untuk membantu orang tua tunggal (*single parent*) sekaligus membantu keuangannya.

Selain itu, Park juga membuat kebijakan khusus untuk pelayanan keluarga yang bercerai, atau orang tua yang meninggalkan anaknya, yaitu memberikan tunjangan kepada para anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya karena tidak bertanggung jawab. Park menaikkan anggaran untuk masing-masing kebijakan yang berada dibawah institusi Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga atau *Ministry Gender Equality and Family*.(Lee & Jalalzai. 2017: 602-605).

Dengan demikian, kenyataan bahwa Park Geun-hye merupakan presiden perempuan pertama di Korea Selatan berpengaruh pada setiap kebijakan yang diambilnya. Latar belakang keluarga, *interest*, dan pengalaman seorang Park Geun-hye berpengaruh terhadap kebijakan yang diputuskan, terlebih pada kasus-kasus yang bersifat *high-level context*, salah satunya kasus nuklir Korea Utara, sebagai mana kita tahu, kegiatan nuklir Korea Utara sering membawa ketegangan antar dua negara, dimana rejim Kim Jong-un melakukan serangkaian percobaan rudal antar benuanya dan terus aktif dalam kegiatan pengembangan nuklir Korea Utara.

Kebijakan dalam merespon krisis nuklir Korea Utara ini sering berbeda-beda antara satu presiden ke presiden lain. Sebagai contoh, pada masa Lee Myung-bak, yang lebih menekankan kebijakan profokatif dan keras yang sering menghasilkan kritik keras dari masyarakat Korea Selatan. Berbeda dengan para presiden sebelumnya, melalui *Trust-politic Policy*, Park Geun-hye melakukan pendekatan-pendekatan bersifat persuasif dengan pendekatan feminisme terhadap perempuan dan anak dalam upayanya mengelola konflik antar dua negara yang bertetangga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana feminisme Presiden Park Geun-hye dalam *Trust-politic policy*?”.

C. Tujuan Penelitian

Dari Penjelasan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : “Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh feminisme Presiden Park Geun-hye Dalam Kebijakan *Trust-PoliticPolicy*”.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori serta kajian yang didapat dalam ilmu hubungan

internasional, khususnya mengenai feminisme dalam politik dari seorang Presiden Park Geun-hye yang peneliti aplikasikan dalam pengambilan kebijakan *Trust-politik Policy*.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan bagaimana feminisme Presiden Park Geun-hye mempengaruhi kebijakan *Trust-politic Policy*-nya, dimana *trust* merupakan kebijakan untuk menanggulangi krisis nuklir Korea Utara. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Bagi Program Studi

Penelitian ini bermanfaat bagi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dalam menambah khasanah kajian keilmuan dan dapat mendukung pengembangan ilmu hubungan internasional itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teori

1. Konsep Feminisme

Feminisme merupakan perspektif baru dalam dunia hubungan internasional, berbeda dengan teori realisme atau liberalisme. Jika berbicara tentang Feminisme, kita tidak bisa lepas dari dua kata “gender” dan “patriarki”. Gender bukan merupakan sinonim untuk istilah perbedaan jenis kelamin, atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan kompleksitas konstruksi identitas sosial dan kebiasaan antara laki-laki dan perempuan (Ruiz. 2003: 1). Dengan kata lain, dengan menggunakan konsep gender, para feminis menganalisis hubungan kekuasaan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, bagaimana kekuatan itu diberikan, dan bagaimana interaksi itu berjalan.

Sama seperti politik, feminisme tidak bisa diartikan dengan mudah, istilah feminis mencakup banyak hal termasuk sikap, kepentingan, dan pandangan, penerjemahannya pun beragam, tergantung dari kelompok-kelompok yang memahaminya (Lovenduski, 2005 : 60-61). Dalam sejarah, feminisme merupakan paham yang menuntut kesetaraan atas perempuan dan laki-laki, jumlah keterwakilannya dalam pemerintah harus sama dengan jumlah yang dimiliki oleh laki-laki, disamping itu tuntutan hak yang sama dalam tatanan sosial. Keterwakilan para kaum perempuan di institusi pemerintah dan bidang-bidang politik didasari dari konsep yang menjadi pemicu tuntutan keterwakilannya. Konsep ini sekurang-

kurangnya dibentuk dari tiga argumen dasar, terdiri atas ; (1) Argumen Keadilan, (2) Argumen Pragmatis dan , (3) Argumen Perbedaan.

1. Argumen Keadilan

Argumen Keadilan merupakan argumen paling kuat dalam menuntut jumlah perwakilan perempuan di pemerintahan. Argumen berpendapat tidak adil jika jumlah perwakilan laki-laki di pemerintahan lebih banyak dari para perempuan, apa lagi di Negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Argumen ini juga di dukung dengan apa yang disebut dengan Kewargaan. Kewargaan merupakan hak, kewajiban dan alat pelengkap bagi setiap individu di suatu Negara, baik laki-laki maupun perempuan. Kewargaan juga menjamin hak-hak perempuan setara dengan laki-laki dalam sistem pemerintahan dan politik.

2. Argumen Pragmatis

Argumen Pragmatis merupakan argumen yang berasal dari kepentingan. Jadi, jumlah perempuan ditambah dalam partai politik untuk mengambil suara masyarakat (khususnya perempuan) yang sadar bahwa keterwakilan perempuan sangat penting, kemudian partai tersebut mendapatkan suara dari para perempuan dan pihak-pihak yang mendukung peran perempuan di pemerintahan.

3. Argumen Perbedaan

Argumen Perbedaan merupakan argumen yang menyatakan bahwa kaum perempuan di anggap mampu membawa perubahan yang baik serta suasana politik yang berbeda. Dalam argumen perbedaan ini pula, para kaum

perempuan dianggap mampu memenuhi kekurangan yang ada dalam sistem politik disuatu Negara, yang belum terjamah dan belum disadari sebelumnya.

Dari tiga jenis argumen terbentuknya konsep feminisme, peneliti menyimpulkan bahwa Argumen Keadilan merupakan argumen paling mewakili keadaan yang terjadi di Korea Selatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik di Korea Selatan sangat sedikit, bahkan perempuan bisa dikatakan jarang terlibat dalam pemilihan umum. Lebih jauh, perempuan tidak pernah menjabat posisi-posisi pemerintahan seperti gubernur, menteri, staff khusus presiden atau jabatan-jabatan lainnya (Lee& Jalalzai. 2017: 602-605).

Perkembangan konsep feminis semakin maju dari waktu ke waktu dengan bermacam klasifikasi yang sangat detail. Adapun aliran feminisme yang paling populer adalah Feminisme kesetaraan, atau *Equal*, atau lebih akrab di panggil Feminisme Liberal. Feminisme jenis ini mengedepankan kesetaraan hak dengan para kaum laki-laki dalam jumlah perwakilannya di pemerintahan. Liberalis juga berpendapat kemampuan para kaum perempuan secara kapasitas dan pengambilan keputusan setara dengan para kaum pria dan tidak ada perbedaan yang mencolok. Disamping itu ada pula konsep Feminisme perbedaan, atau lebih akrab disebut dengan Feminisme Sosial. Para aliran sosial ini berpendapat bahwa perempuan memiliki perbedaan dengan para laki-laki yang membuat mereka dapat memandang dan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda, para kaum perempuan juga dapat menemukan solusi yang mewakili kaum mereka dalam hal-

hal penting yang tidak bisa di bayangkan oleh para laki-laki sebelumnya. Atas dasar inilah keterwakilan para Feminis sosialis harus ada dalam lembaga-lembaga pemerintahan.

Pemahaman atas perbedaan dan kesetaraan membuat para politikus perempuan mampu mewakili kaumnya dalam institusi pemerintahan dan memperjuangkan tuntutan, sekaligus menepis anggapan bahwa perempuan tidak bisa mengambil keputusan di bidang-bidang krusial.

Sejalan dengan pengertian Feminisme yang disampaikan oleh Lovenduski sebelumnya, Mary Hawkesworth dalam jurnalnya yang berjudul *Policy Studies Within a Feminist Frame*(1994), menjelaskan bahwa :

“Feminism is a political movement inspired by a belief in the fundamental equality of men and women and committed to the eradication of gender-based injustice.”

Ini menegaskan bahwa konsep Feminisme lahir dari rasa ketidakadilan perlakuan para lelaki dalam kegiatan politik di institusi-institusi negara, partai dan hak-hak dasar perempuan di tempat kerja mereka. Walaupun Hawkesworth menegaskan dalam tulisannya bahwa Feminisme tidak sekaku apa yang sudah ia simpulkan diatas, karena Feminisme sangat kaya dan beragam sekaligus kompleks, artinya banyak sekali dimensi tuntutan dan pemahaman Feminisme yang bisa mengubah pengertian yang sudah disimpulkan oleh Hawkesworth. Seperti yang disampaikan oleh Diana Thorburn, yang mengatakan bahwa:

“there can never be a truly singular voice of feminist foreign policy simply because of the diversity of views within feminism itself.”

Persepektif pandangan dari berbagai ahli menjadikan feminisme bersifat fleksibel dan luas, mencakup aspek-aspek yang kompleks, seperti tuntutan tunjangan melahirkan, hak suara, hak konstitusi, kebebasan menggunakan pakaian, hak untuk bekerja di institusi negara, libur melahirkan yang lebih panjang, asuransi melahirkan terlepas dari ancaman kekerasan seksual, terhindar dari stereotif.

Terpilihnya Park Geun-hye pada pemilu 2012, menjadikan ia presiden perempuan pertama dalam pemerintahan Korea Selatan sepanjang sejarah terbentuknya negara tersebut. Menurut Sung Deuk Hahm dan Uk Heo dalam tulisan mereka yang berjudul “*South Korea : Park Geun-hye’s Leadership and South Korean Democracy*”(2017), terpilihnya Park Geun-hye sebagai presiden tidak terlepas dari keunikan dan karakteristik gaya kepemimpinannya, selain itu, masih dalam tulisan yang sama, saat terpilihnya Park Geun-hye, banyak institusi di Korea Selatan masih belum sepenuhnya menerapkan sistem demokrasi (*immature democratic institutions*). Sentuhan feminis dalam kebijakannya memberikan gambaran baru bagi Korea Selatan yang maju, demokrasi dan beradab. Bisa kita lihat, kebijakan yang diterapkan Park Geun-hye mengedepankan harmoni, hubungan baik serta kerjasama antara dua negara yang bersaudara tersebut, jauh berbeda dengan para pemimpin Korea Selatan sebelumnya yang mengedepankan kebijakan represif dan cenderung keras.

2. Keamanan Nasional (*National Security*)

Keamanan nasional (*National Security*) didasari atas kekhawatiran terhadap kekuatan yang ada disekitarnya. Dalam konsep ini, kekuatan (*power*) merupakan

faktor kunci, dengan mengedepankan kekuatan ekonomi bersamaan dengan kekuatan militer serta strategi keamanan. Keamanan Nasional meliputi kebijakan dan aksi yang dibuat guna melindungi nilai-nilai yang ada pada tiap Negara dari ancaman luar, pelaksanaan kebijakan dari masing-masing negara pun beragam, tergantung dari *interest* masing-masing (Melvyn, 2015 : 143).

National security juga tidak lepas dari sejarah, dalam hal ini sejarah secara otomatis menjadi pembentuk arah kebijakan untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar, yang kemudian diterapkan oleh suatu negara. Menurut Berkowitz, Keamanan Nasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak eksternal. (1965 : 44). Disisi lain, Harold Brown yang merupakan *Secretary of Defense* Amerika Serikat pada tahun 1977-1981, mendefinisikan Keamanan Nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk menjaga integritas wilayahnya untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara lain, demi menjaga kepentingan negara masing-masing. Keamanan Nasional juga mencakup pengelolaan negara dari ancaman eksternal serta mengontrol perbatasan (Cynthia, 2018: 5)

Bila dilihat dalam strategi kebijakan *Trust-Politic Policy* yang diterapkan oleh rejim Park Geun-hye, lebih khususnya pada poin pertama, yaitu *deterrence/defense*, terlihat jelas bahwa membangun hubungan saling percaya dengan Korea Utara, tidak bisa mengabaikan kekuatan internal negara. Park Geun-hye memandang, penguatan internal negara akan menaikkan *bargain* untuk menghadapi provokasi negara tetangga disekitarnya. Dalam sisi sejarahpun, yang kita ketahui, Korea Utara menyita perhatian para elit di Korea Selatan dari masa ke masa, pemerintah Korea

Selatan dituntut harus memberikan perlakuan khusus untuk mengelola masalah dengan Korea Utara, sekaligus untuk mencegah perang terbuka terjadi kembali seperti Perang Korea pada tahun 1950-an lalu.

Dalam konsep dasar ilmu hubungan internasional, setiap kebijakan yang diambil suatu negara, yang diterapkan menjadi politik luar negeri, merupakan inti sari dari kepentingan domestik, artinya para pengambil keputusan dituntut untuk paham betul dengan keadaan didalam negaranya, ini sejalan dengan pengertian yang dipaparkan Harold Brown sebelumnya, Karena hal inilah penulis menggunakan teori Keamanan Nasional (*National Security*) untuk memaparkan secara detail alasan-alasan yang menjadi dasar Park Geun-hye menerapkan *Trust-Politic Policy* pada masa kepemimpinannya sebagai upaya mencegah kegiatan nuklir Korea Utara.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, oleh beberapa orang dengan menggunakan teori atau konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan penulis, antara lain;

1. Motivasi Park Geun-Hye Menerapkan Kebijakan *Trust Politic* Dalam Menghadapi Korea Utara Tahun 2013-2016

Penulis : Siska Ayu Anggraini

Terbit : Jurnal JOM FISIP UNRI Vol 6: edisi 1 Januari–Juni 2019

Dalam penelitian ini, penulis memulai dengan motivasinya dalam mengambil isu Park Geun-hye dan *Trust-Politic*-nya, dimana penulis sangat tertarik dengan sosok seorang Park Geun-hye yang bukan merupakan anggota parlemen secara tiba-tiba menjadi presiden terpilih pada tahun 2012 dengan mendapati 78,6 % suara dari seluruh wilayah di Korea Selatan, yang sekaligus jumlah terbesar selama 15 tahun terakhir. Penulis juga tertarik dengan kebijakan *Trust-Politic Policy* yang di gaungkan oleh Park Geun-hye selama masa kampanye-nya.

Pasca Perang Dunia II, Korea Selatan dan Korea Utara memasuki masa konfrontasi berkepanjangan, permusuhan serta persaingan di wilayah timur Asia, yang secara otomatis membawa kedua negara bertetangga ini ke dalam persaingan strategis (*Strategic Rivalry*). Sejak menjabat pada 25 Februari 2013, hubungan kedua negara ini dalam krisis yang sangat mengkhawatirkan, terlihat banyaknya konfrontasi Korea Utara terhadap Korea Selatan melalui kegiatan uji coba nuklirnya, terlebih lagi, Korea Utara berada dalam transisi kepemimpinan dari Kim Jong-il ke Kim Jong-un yang hampir bersamaan.

Trust-Politic Policy yang diterapkan oleh Park Geun-hye sesaat setelah menjabat sebagai presiden Korea Utara, merupakan sintesa dari *Sunshine Policy* Kim Dae-jung dan Kebijakan Garis Keras yang dimiliki oleh Lee Myung-bak, karena kebijakan ini terkesan tidak lembek dan tidak pula keras, dikatakan tidak lembek karena *Trust-Politic Policy* masih mengedepankan *power* dari internal negara Korea Selatan sendiri, terlihat dari poin pertama dalam kebijakannya, yaitu *deterrence/defense*. Sedangkan dikatakan tidak keras karena kebijakan ini bertujuan

menciptakan rasa percaya antar kedua negara tersebut. Park Geun-hye juga menyampaikan bahwa *trust* merupakan sifat yang fundamental yang harus dimiliki individu maupun negara demi terciptanya kerjasama dan perdamaian.

2. Evolusi Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara :

Trust-Politic Policy Park Geun-hye

Penulis : Evita & Dr Eric Hiariej, M. Phil

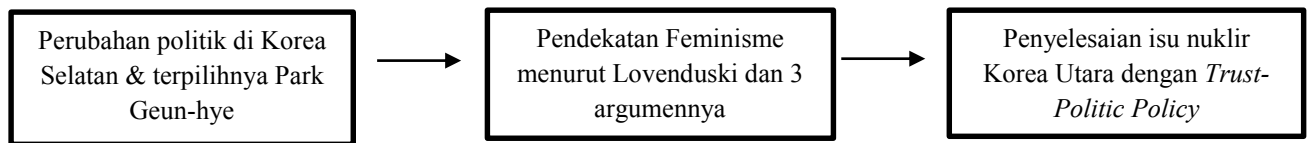
Terbit :Tesis Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas
Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada,
2015

Selesainya Perang Dunia II lalu berlanjut ke Perang Dingin, menjadikan Korea terbagi dua, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Hegemoni kedua negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat dua negara bertetangga tersebut bertikai, konflik demi konflik kerap terjadi antara keduanya, hingga meletusnya Perang Korea, yang menewaskan lebih dari 2 juta korban jiwa dari kedua belah pihak. Paham yang jauh berbeda antara sosial-komunis dan kapitalis-demokratis, adalah dasar dari ketegangan kedua negara yang berada di semenanjung Korea tersebut. Alhasil, kebijakan demi kebijakan kerap dibuat oleh Korea Selatan dalam mengantisipasi konfrontasi Korea Utara yang terus-terusan membawa ancaman bagi stabilitas kawasan. Korea Selatan, salah satunya, menjalin kerjasama keamanan dengan AS guna mengambankan wilayahnya dari Korea Utara yang selalu ingin merebutnya.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada kebijakan *Trust-Politic Policy* yang dicanangkan oleh Park Geun-hye untuk menciptakan status kawasan yang kondusif, sekaligus mengubah semenanjung Korea yang sebelumnya merupakan zona konflik menjadi zona kepercayaan. *Trust-Politic Policy* ini merupakan upaya untuk mengubah pandangan dunia bahwa Asia Timur, khususnya Semenanjung Korea merupakan wilayah yang rawan konflik dan perang. Korea Selatan juga dibantu AS dan PBB yang kerap memberikan sanksi kepada Korea Utara untuk menghentikan provokasi nuklirnya. Dengan keadaan seperti ini, Korea Selatan ingin membangun rasa percaya terhadap Korea Utara dengan beberapa strategi, seperti *trust diplomacy* dan *cooperations*. Dengan terciptanya rasa saling percaya antara keduanya, rejim Park Geun-hye yakin akan terciptanya peluang kerjasama yang akan membawa manfaat bagi semua dipihak di dua negara tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Dalam memperjelas kerangka pikir dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambar alur penelitian yang menjadi landasan penelitian. Kerangka pikir juga di maksud untuk menyatakan dengan gamblang terhadap kontruksi pikiran yang dipahami oleh peneliti, berikut skema tabel penulis untuk penelitian ini :



Skema tabel diatas menjelaskan alur berpikir peneliti dalam meneliti feminisme Park Geun-hye dalam kebijakan *Trust-politic Policy*. Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, Park Geun-hye memiliki latar belakang keluarga yang unik, lahir dari keluarga elit, dibesarkan di *blue house*, tragedi pembunuhan Ibu dan ayahnya, mengalami depresi, hilang dari sorotan publik hingga kembali dan bergabung dalam partai politik dan memenangkan pemilihan umum ditahun 2012 sekaligus menjadi presiden perempuan pertama di Korea Selatan.

Pergolakan politik hingga perubahan kebijakan sering terjadi pada negara-negara didunia tidak terkecuali Korea Selatan, Peneliti melakukan pendekatan Feminisme sosial yang diambil dari argumen Lovenduski dalam hal pembuatan kebijakan *Trust-Politic Policy*. Masyarakat Korea Selatan sudah lelah dengan masalah nuklir Korea Utara yang sering mendatangkan kekhawatiran dikawasan. Banyak yang menginginkan permasalahan nuklir Korea Utara segera selesai dan kedua negara yang bertetangga tersebut dapat bekerjasama dalam pembangunan.

Masyarakat Korea Selatan merasa perlu kebijakan baru dari pemimpin yang baru. Pada masa kampanye pemilihan umum 2012, Park Geun-hye memainkan isu ini dengan sempurna, sekaligus memperkenalkan konsep politik “*trust*” dimana

serangkaian kebijakan dibuat dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, atas dasar inilah, salah satunya, Park Geun-hye bisa memenangkan pemilu nasional di Korea Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam proses mencapai tujuan itu digunakan metode dan alat-alat, dimana keseluruhannya termasuk dalam metodologi. Sedangkan penelitian adalah pencarian yang intensif dan terarah untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena sosial dan fisik. Penelitian merupakan bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk membangun suatu fakta, teori, prinsip atau aplikasi dari fakta, prinsip dan teori itu sendiri (Bakry. 2016: 5).

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji literatur dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian Kualitatif merupakan teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, serta proses sosial (Bakry. 2016 : 62-63).

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah *secondary resource*. *secondary resource* atau data sekunder merupakan data yang didapat dari jurnal, buku, penelitian, surat kabar, situs dan lainnya.

Data sekunder bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu seperti tesis, jurnal, dan *research* yang berkaitan langsung dengan Feminisme, penerapan *Trust-Politic Policy* untuk mereduksi kegiatan nuklir Korea Utara, serta latar belakang Park Geun-hye memengaruhi kebijakannya. Disamping itu, penyediaan data sekunder juga berasal dari *website*, surat kabar, artikel ilmiah serta buku-buku yang berkaitan.

C. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang diambil dalam tulisan ini adalah pengaruh paham Feminisme presiden Park Geun-hye dalam *Trust-Politic Policy*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Berbasis Internet

Teknik Berbasis Internet ini merupakan pengumpulan data dari situs-situs yang otentik dan terpercaya, baik situs resmi pemerintahan suatu negara, situs penelitian atau surat kabar, yang kemudian diseleksi secara mendalam guna memastikan kredibilitas isi kontennya. Adapun beberapa data yang didapat dari internet seperti *Trust – The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration* yang ditulis langsung oleh Dr. Seongwhun Cheon yang merupakan supervisor anggota Kementerian

Unifikasi Korea Selatan sekaligus ketua dalam *Director of Center for North Korean Studies at Korea Institute for National Unification* (KINU), lalu *The First Female President in South Korea: Park Geun-hye's Leadership and South Korean Democracy* yang tulis oleh Sung Deuk Hahm dan Uk Heo, atau *President Park Geun-Hye of South Korea: A Woman President without Women?* Yang ditulis oleh Young-Im Lee dan Farida Jalalzai, serta banyak lagi jurnal ilmiah yang relevan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif yang menurut Miles dan Huberman (1992: 20) terdapat tiga alur bersamaan dalam kegiatan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan pengolahan data-data kasar yang diperoleh dari lapangan. Selama penelitian berlangsung dan dilakukan pengumpulan data maka dilakukan reduksi data berupa merangkum, membuat kode, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan dan mengarahkan serta menghilangkan yang tidak perlu atau tidak relevan dengan topik yang kemudian ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan pemilihan topik mengenai feminisme Park Geun-hye dalam *Trust-politic Policy*, kemudian pemusatan perhatian pada pokok-pokok pembahasan

secara terstruktur dan urut. Kemudian peneliti melakukan penyederhanaan agar mengarah pada substansi, dimana peneliti menekankan pada seberapa paham feminisme memengaruhi kebijakan yang diambil oleh Park Geun-hye dalam kebijakan *Trust-politic Policy*, yang merupakan kebijakan untuk menanggulangi krisis nuklir Korea Utara.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan atau penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uraian singkat dan teks naratif yang digunakan untuk menggambarkan analisis data yang diperoleh peneliti. Peneliti menggambarkan dalam bentuk narasi mengenai latar belakang Park Geun-hye dan ketertarikannya dalam bidang feminisme yang kemudian memengaruhi kebijakannya. Kemudian peneliti juga akan menjelaskan secara detail tentang keadaan politik dalam negeri Korea Selatan sehingga Park Geun-hye menjadi presiden terpilih sekaligus presiden perempuan pertama di negara yang memiliki budaya patriarki yang tinggi. Setelah itu penulis akan menyampaikan dinamika kepemimpinan Park Geun-hye selama menjabat sebagai presiden Korea Selatan, hingga tercetusnya kebijakan *Trust-Politic Policy* sebagai tindakan persuasif untuk menanggulangi krisis nuklir Korea Utara.

3. Verifikasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan verifikasi data diantaranya berupa mengumpulkan, mengorganisir dan kemudian menarik kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh, baik data primer maupun sekunder sehingga penelitian menjadi valid dan kredibel. Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan kemudian mengelola data-data yang sudah diperoleh dengan memperhatikan sumber data kredibel dan valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terpilihnya Park Geun-hye

A.1. Latar Belakang Kehidupan

Park Geun-hye terlahir dalam keluarga penting, ayahnya, Park Chun-hee merupakan panglima tinggi di Korea Selatan. Pada 16 Mei 1961, Park Chun-hee melancarkan kudeta kepada pemerintah dan menjabat sebagai kepala negara selama 18 tahun (Hanm & Heo. 2017:6), jadi secara otomatis kehidupan masa kecil Park Geun-hye dihabiskan di istana negara, *Blue House*. Pada tahun 1974, Yook Young-soo dibunuh, Park Geun-hye secara *de facto* menjabat sebagai ibu negara menggantikan ibunya yang terbunuh, secara otomatis Park Geun-hye merasakan pengalaman politik pertamanya dengan jabatan yang cukup penting (Ha. 2013: 142). Lima tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1979, ayahnya, Park Chun-hee, meninggal dalam pembunuhan yang dilakukan oleh tangan kanan nya, Kim Jae-kyu yang merupakan kepala badan intelijen nasional Korea Selatan. Pada saat kejadian itu, Park Geun-hye yang baru berusia 27 tahun harus menarik diri dari publik selama 18 tahun lamanya, berjuang menghidupi kedua adiknya dan mengubah gaya hidupnya yang mewah.

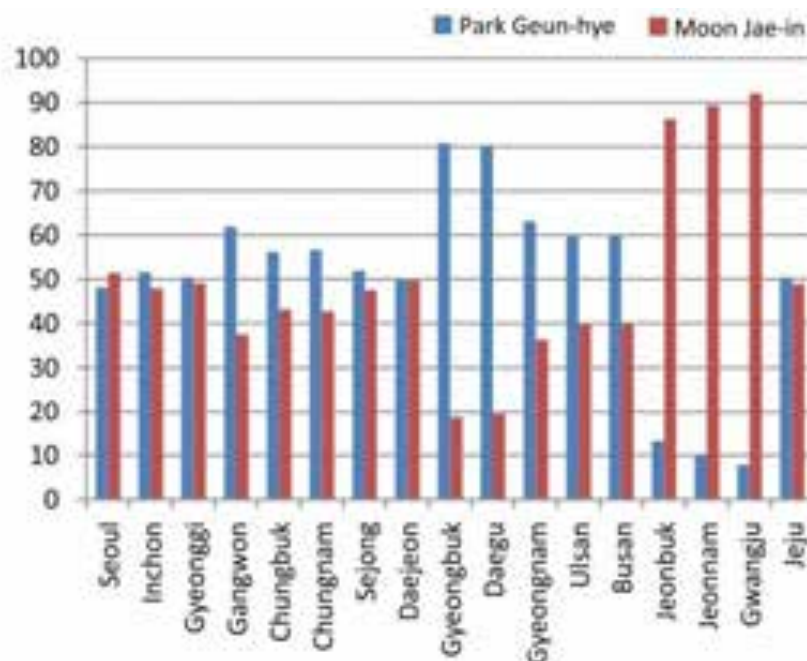
A.2. Karir Politik

Transisi sistem demokrasi di Korea Selatan memberikan harapan baru bagi Park Geun-hye yang ingin terjun ke dunia politik. Ada beberapa alasan mengapa Park Geun-hye mendapatkan peluang tersebut, diantaranya; (a) dalam sistem demokrasi, para politisi dipilih oleh para pemilihnya agar mendapatkan jabatan tertentu yang mereka perjuangkan, (b) krisis moneter yang dialami Korea Selatan pada tahun 1997 membawa kembali kenangan masyarakat Korea Selatan akan kepemimpinan ayahnya, Park Chung-hee, yang dianggap mampu menciptakan ekonomi dan politik yang kondusif, (c) karena kemampuan Park Chung-hee dalam membangun ekonomi yang baik selama jabatannya, ia pun disanjung dan didukung oleh banyak masyarakat di provinsi Gyeongsang dan daerah miskin (*rural area*) di banyak daerah di Korea Selatan. Dari faktor-faktor diatas, Lee Hoi-chang, yang merupakan presiden dari *Grand National Party* (GNP) mengajak Park Geun-hye untuk bergabung didalam partai tersebut sekaligus kali pertama tampil dihadapan publik setelah bertahun-tahun menghilang (Hanm & Heo. 2017:8). Park Geun-hye dengan mudah mendapatkan suara pada pemilu 1998, khususnya di daerah asal ayahnya, di Daegu. Tujuh tahun setelahnya, pada tahun 2004, Park Geun-hye mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin partai GNP, karena pemimpin partai sebelumnya, Choi Byong-ryeol tersandung kasus dana kampanye yang illegal dan publik menginginkan wajah baru untuk memimpin partai dan maju dalam pemilihan umum selanjutnya (Ha. 2013: 148).

A.3. Pemilihan Umum

Pada pemilihan umum tahun 2012, ada tiga kandidat yang maju sebagai calon terkuat dari berbagai partai besar di Korea Selatan, Park Geun-hye dari Seanuri, Moon Jae-in dari DUP serta jalur independen Ahn Cheol-soo. Dalam kampanye-nya, Park Geun-hye berhasil membangun imej baru dari dirinya sekaligus memilih isu-isu yang menjadi isu penting pada saat itu. Pertama, Park Geun-hye memulai dengan membangun imej dirinya sebagai orang yang besebrangan pandangan politik dengan Lee Myung-bak secara politik dan jauh dari pendukung-pendukung Lee Myung-bak, presiden yang banyak menerima kritikan dari masyarakat Korea Selatan karena isu pemindahan kantor kenegaraan dari Seoul ke Sejong. Park Geun-hye menjadi orang yang menentang rencana itu dan berperan sebagai oposisi dalam kebijakan yang diambil oleh Lee Myung-bak. Kedua, Park Geun-hye memainkan keadaan politik dan ekonomi yang didominasi oleh kaum laki-laki, dimana jabatan-jabatan fungsional dipegang oleh laki-laki dan sedikit sekali peran perempuan, dengan slogan "*prepared to female president*", Park Geun-hye membawa isu gender dalam kampanye-nya, Park mengklaim kalau presiden perempuan sangat penting tidak hanya untuk Korea Selatan, melainkan juga untuk kawasan Asia (Youngme. 2013: 328). Ketiga, Park Geun-hye berjanji melakukan demokratisasi ekonomi dan mengutamakan kesejahteraan untuk rakyat Korea Selatan, yang terakhir adalah dengan menjanjikan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan akan sama dan jauh lebih baik seperti era ayahnya menjabat, keputusan ini tidak terlepas dari banyaknya suara masyarakat Korea Selatan diberbagai daerah yang merindukan masa Park Chun-hee. Pada pemilu nasional tanggal 19 Desember 2012, Park Geun-

hye menjadi pemenang dengan meraih suara sebanyak 51,6 persen dibandingkan dengan lawannya dari partai DUP, Moon Jae-in yang hanya meraih 48,0 persen suara (Youngme. 2013: 329)..



Sumber : 2012 Presidential Elections results (breakdown by province). Dalam

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2012/09/24/2012092402733.html, diakses pada 10 Juni 2019.

Dalam perjalanan karir politiknya, Park Geun-hye memberikan banyak prestasi, diantaranya; pemimpin partai oposisi, mendominasi suara pada pemilihan nasional ditahun 2012, mendapatkan pujian publik karena program dan strategi yang ia buat dan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan, menaikkan anggaran Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (*Ministry of Gender Equality and Family*) untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung perempuan.

Terpilihnya Park Geun-hye menjadi presiden perempuan pertama melalui pemilihan yang demokratis berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Feminisme Sosial, dimana paham ini berakar dari argumen perbedaan, yang menjelaskan bahwa pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan setaraf nasional. Konsep ini meyakini pola pikir para kaum perempuan dalam menanggapi masalah menjadi sesuatu yang diperlukan. Sejalan dengan kebijakan *Trust-Politic Policy* yang diambil oleh Park Geun-hye setelah terpilih menjadi presiden perempuan pertama Korea Selatan. Pendekatan yang diambil dalam kebijakannya adalah pendekatan yang persuasif namun sistematis, detail dan memiliki target yang jelas. Peneliti semakin meyakini bahwa Park Geun-hye merupakan seorang presiden yang memiliki paham feminis, ini dibuktikan ketika *Trust Politic Policy* berbasis pada kepercayaan atau “*trust*” dan kebahagiaan “*happiness*” bagi semua masyarakat yang ada di Korea Utara dan Korea Selatan. Park Geun-hye lebih memilih kebijakan yang persuasif dari pada kebijakan yang keras dan konfrontatif. Disamping itu juga Park Geun-hye menyiapkan NGO lokal terkait untuk membantu ibu hamil dan anak-anak di daerah Korea Utara.

B. Park Geun-hye dan Feminisme

Peneliti meyakini, pengalaman masa kecil Park Geun-hye yang berasal dari keluarga elit, mengalami trauma karena kedua orang tuanya dibunuh dan mengubah gaya hidupnya yang mewah menjadi sederhana, berpengaruh pada cara berpikirnya, terlebih dalam pengambilan kebijakan di level pemerintahan. Park Geun-hye

menjadi anggota legislatif nasional Korea Selatan selama 14 tahun, selama ia menjabat, Park telah mengajukan 15 kali rancangan pembelanjaan kebijakan, walaupun lebih sedikit dari pada para anggota legislatif lainnya, Park Geun-hye memasukan kebijakan yang menitikberatkan pada perempuan dan anak. Sebagai contoh, Park Geun-hye mempromosikan kebijakan untuk memotong jam kerja para perempuan hamil dan memberikan tunjangan untuk keperluan orang tua tunggal (Lee & Jalalzai. 2017:602). Disamping itu, Park Geun-hye juga mengadvokasi para perempuan korban kekerasan dan memberikan peluang untuk para perempuan terlibat dalam organisasi dan institusi pemerintahan (Go and Sohn 2012).

Selama masa kampanye sebelum pemilihan umum, Park Geun-hye menyuarakan *tagline* “*the prepare first female president*”, yang kemudian digunakan terus menerus hingga pemilihan nasional Korea Selatan. Hampir bersamaan dengan kebijakan yang diluncurkan oleh lawannya, Moon Jae-in, Park Geun-hye juga mempublikasikan program-program yang mengedepankan kepentingan perempuan dan anak, seperti menyediakan anggaran untuk keperluan *Daycare* dan peningkatan pekerja perempuan disektor industri. Tetapi ada yang berbeda dengan lawannya, Park mengampanyekan untuk para ibu hamil termasuk memangkas jam kerja bagi ibu hamil dan penyediaan program nutrisi. Kebijakan yang diluncurkan Park berpengaruh dengan jumlah pemilih pada tahun 2012, dimana pemilih perempuan naik sebanyak 76,1 % (Kim. 2014: 81).

Setelah terpilih menjadi presiden Korea Selatan, Park melanjutkan kebijakannya yang terfokus pada perempuan dan anak, ini dibuktikan dengan dukungannya terhadap Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluar (*Ministry*

Gender Equality and Family). Peneliti akan membarikan data yang dibandingkan dengan rejim Lee Myung-bak sebelumnya. Selama menjabat dari tahun 2013 hingga 2016, Park terfokus pada peningkatan pekerja perempuan yang dikhususkan pada pekerja yang memiliki halangan untuk bekerja selama mengandung dan melahirkan. Park juga memperbaiki servis *daycare* dan *childcare* untuk membantu para kaum ibu mengetahui kebutuhan nutrisi dan tumbuh kembang anak. Jika dibandingkan pada masa Lee Myung-bak, Park lebih konkret dalam hal mengimplementasikan kebijakannya yang peduli dengan perempuan dan anak (Lee & Jalalzai. 2017:605). Pembangunan perempuan (*woman development*) terus digalakan pada masa kepemimpinan Park Geun-hye, Ketentuan untuk pengasuhan anak dan cuti melahirkan, pengasuhan anak serta membuat rancangan langkah-langkah untuk meningkatkan status ekonomi, politik, dan sosial perempuan. Disamping itu Park juga menyuarakan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan kebijakan utama dalam hal kesetaraan gender (Lee & Jalalzai. 2017:605).

C. Park Geun-hye dan *Trust-politic Policy*

Dalam penelitian ini, peneliti juga membahas kebijakan *Trust-Politic Policy* yang dicanangkan oleh Park Geun-hye untuk menciptakan status kawasan yang kondusif, sekaligus mengubah semenanjung Korea yang sebelumnya merupakan zona konflik menjadi zona kepercayaan. *Trust-Politic Policy* ini merupakan upaya untuk mengubah pandangan dunia bahwa Asia Timur, khususnya Semenanjung Korea merupakan wilayah yang rawan konflik dan perang. Korea Selatan juga

dibantu AS dan PBB yang kerap memberikan sanksi kepada Korea Utara untuk menghentikan provokasi nuklirnya. Dengan keadaan seperti ini, Korea Selatan ingin membangun rasa percaya terhadap Korea Utara dengan beberapa strategi, seperti *trust diplomacy* dan *cooperations*. Dengan terciptanya rasa saling percaya antara keduanya, rejim Park Geun-hye yakin akan terciptanya peluang kerjasama yang akan membawa manfaat bagi semua dipihak di dua negara tersebut.

Trust-Politic Policy yang dicanangkan oleh Park Geun-hye untuk menciptakan status kawasan yang kondusif, sekaligus mengubah semenanjung Korea yang sebelumnya merupakan zona konflik menjadi zona kepercayaan. *Trust-Politic Policy* ini merupakan upaya untuk mengubah pandangan dunia bahwa Asia Timur, khususnya Semenanjung Korea merupakan wilayah yang rawan konflik dan perang. Korea Selatan juga dibantu Amerika Serikat dan PBB yang kerap memberikan sanksi kepada Korea Utara untuk menghentikan provokasi nuklirnya. Dengan keadaan seperti ini, Korea Selatan ingin membangun rasa percaya terhadap Korea Utara dengan beberapa strategi, seperti *trust diplomacy* dan *cooperations*. Dengan terciptanya rasa saling percaya antara keduanya, rejim Park Geun-hye yakin akan terciptanya peluang kerjasama yang akan membawa manfaat bagi semua dipihak di dua negara tersebut.

Pasca terpilihnya Park Geun-hye dalam pemilihan nasional pada tahun 2012, arah kebijakan Korea Selatan berubah, termasuk dalam menangani krisis nuklir Korea Utara yang semula keras dibawah kepemimpinan Lee Myung-bak menjadi lebih lembut dengan mengedepankan *soft diplomacy*. Diawal kepemimpinan Park Geun-hye, presiden pertama Korea Selatan ini mencanangkan konsep “*trust*” dalam

konsep kebijakannya, konsep *trust* yang dibuat oleh Park merupakan konsep yang tidak hanya berlaku pada level domestik melainkan juga pada level eksternal. *Trust-Building Process* terdiri atas tiga garis besar, yaitu *Objectives*, *Principles*, dan *Policy Initiatives*. Ketiga garis besar ini kemudian diperjelas dalam beberapa kebijakan yang konkret, *Objectives* terdiri atas; memperkuat ikatan antar Korea Selatan dan Korea Utara, membangun perdamaian di Semenanjung Korea, menyusun landasan untuk kebijakan unifikasi. *Principles*; pendekatan yang berimbang, mengembangkan kebijakan Korea Utara dan kerjasama internasional. *Policy Initiatives*; membangun kepercayaan antar-Korea, perdamaian berkelanjutan di Semenanjung Korea, memperkuat infrastruktur untuk kepentingan unifikasi dan yang terakhir adalah inisiasi perdamaian dan kerjasama di Asia Timur

Tabel 2: Trust-Building Process dalam administrasi Park Geun-hye

Objectives	1. Improve inter-Korean ties 2. Establish peace on the Korean Peninsula 3. Lay out groundwork for Unification
Principles	1. Balanced approached 2. Evolving North Korean policy 3. International cooperation
Policy Initiatives	1. Inter-Korean trust-building 2. Sustainable peace on peninsula 3. Reinforcement of infrastructure for unification 4. Northeast Asia peace and cooperation initiative

Sumber : Republic of Korea Ministry of Unification, 2013 dalam Kang, Stephanie Nayoung. (2014). *"Building Trust on the Korean Peninsula: An Assessment of Trustpolitik for Inter-Korean Relations."*

Untuk mengatasi krisis nuklir Korea Utara, konsep *trust* yang semula bersifat umum, disempitkan lagi dalam bentuk lebih konkret. Konsep ini lebih dikenal dengan *trust-politic*. Konsep ini terdiri dari tiga pilar utama, diantaranya; pertahanan yang kuat (*deterrence/defense*), diplomasi kepercayaan (*Trust Diplomacy*), dan yang terakhir adalah *Korean Peninsula trust process*. Dalam menjabarkan *Trust-politic Policy* ini, peneliti akan membagi penjelasannya dalam beberapa poin, sekaligus memaparkan secara gamblang penerapan konsep atau teori yang dipakai dalam penelitian ini relevan dengan rumusan masalah yang digunakan.

C.1. *Trust-politic Policy* dan Konsep Keamanan Nasional

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab 2 sebelumnya, Keamanan Nasional memiliki pengertian; segala kebijakan dan aksi yang dibuat guna melindungi nilai-nilai yang ada pada tiap negara dari ancaman luar (Melvyn. 2015: 143). Keamanan Nasional juga didasari atas kekhawatiran terhadap kekuatan yang ada disekitarnya. Keamanan Nasional juga terikat dengan sejarah, dalam hal ini sejarah secara otomatis menjadi pembentuk arah kebijakan untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar, yang kemudian diterapkan oleh suatu negara, sekaligus sebagai upaya dalam melindungi nilai-nilai internal suatu negara dari ancaman luar (Berkowitz. 1965: 44).

Kegiatan nuklir Korea Utara, dari era perang dingin hingga percobaan nuklir kelimanya, membawa kekhawatiran dikawasan Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Perbedaan ideologi dari masing-masing negara disemenanjung Korea

tersebut merupakan faktor utama dalam terciptanya krisis yang berkelanjutan. Korea Selatan yang mengedepankan demokrasi sekaligus percaya bahwa dengan sistem pemerintahan yang demokratis dapat membawa kemajuan dinegara tersebut, besebrangan dengan ideologi yang dianut oleh Korea Utara, yang lebih percaya pada sistem Komunis Sosialis, yang secara tidak langsung didukung oleh negara-negara yang memiliki ideologi serupa, seperti Cina dan Russia. Sebagai negara yang bertetangga langsung dengan Korea Utara, nilai-nilai yang ada termasuk ideologi dan keamanan diinternal Korea Selatan sangat rentan oleh kegiatan nuklir Korea Utara (Cheon. 2013: 2). *Trust-politic Policy* yang diterapkan oleh rezim Park Geun-hye, terutama pada pilar pertama, yaitu pertahanan (*deterrence/defense*), memiliki tujuan untuk melindungi nilai-nilai yang ada dalam internal Korea Selatan itu sendiri. Penguatan pertahanan bertujuan untuk membalas konfrontasi kegaitan nuklir Korea Utara, jadi dengan kata lain, Korea Selatan membalas Konfrontasi dengan Konfrontasi jika diperlukan. Pemerintahan Park Geun-hye mempersiapkan diri sepenuhnya terhadap ancaman-ancaman yang dilancarkan oleh Korea Utara, yang berkaitan dengan senjata nuklirnya. Korea Selatan memulai mencoba menghilangkan stigma negatif bahwa Korea Utara merupakan negara berkekuatan nuklir dan mengedepankan negosiasi serta kerjasama, namun tidak menutup kemungkinan memobilisasi pertahanan terkuat dalam negeri sekaligus pengaktifan Traktat Pertahanan Bersama ROK-U.S (ROK-U.S *Mutual Defense Treaty*).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, pilar *deterrence/defense* yang ada dalam tiga pilar *Trust-politic Policy* memiliki pendekatan defensif sekaligus persuasif. Rejim Park Geun-hye mengedepankan negosiasi dan

kerjasama, namun tetap siaga didalam semua kemungkinan ancaman yang dilancarkan Korea Utara untuk melindungi negaranya, ini sejalan dengan konsep yang dipakai dalam penelitian yang peneliti tulis, bahwa Kepentingan Nasional adalah segala upaya dalam melindungi nilai-nilai yang ada didalam suatu negara dari ancaman luar.

C.2. Park Geun-hye dan Keperdulianya Terhadap Anak-anak dan Perempuan

Penelitian ini dimulai dengan pendekatan feminisme yang telah ditulis oleh Lovenduski dalam bukunya yang berjudul *Politik Berparas Perempuan*. Konsep yang disampaikan Lovenduski terdiri dari tiga argumen pendekatan, yaitu; argumen keadilan, argumen perbedaan dan argumen pragmatis. Peneliti akan memaparkan kembali ketiga argumen ini. Yang pertama adalah argument pragmatis, dimana argumen ini dibangun karena keterlibatan perempuan dalam politik dan partai politik lebih didorong karena banyaknya tuntutan masyarakat untuk melibatkan perempuan, disisi lain karena adanya peluang politik yang besar jika melibatkan perempuan dalam partai politik untuk mendapatkan suara para kaum perempuan disuatu negara, pada saati itu publik Korea Selatan sudah lelah dengan tensi yang tak kunjung mereda terhadap Korea Utara, publik Korea Selatan menginginkan kebijakan yang baru untuk menyelesaikan masalah dengan Korea Utara tanpa ada perang dan konflik. Bergabungnya Park Geun-hye dalam partai Seungriyang diminta oleh pemimpin partai pada waktu itu adalah karena latar belakangnya sebagai mantan anak presiden yang memerintah Korea Selatan pada 1963-1975, yaitu Park Chun-hee, disamping itu Park Geun-hye mulai dilirik oleh publik pasca

menghilangnya dari publik setelah ibunya terbunuh. Dengan kata lain, keikutsertaan Park Geun-hye dalam kegiatan politik nasional berlatar belakang dari keinginan publik untuk mendapatkan figur baru, yang kemudian berdampak langsung terhadap kebijakan *Trust-politic Policy* yang dia terapkan pada kemimpinannya ditahun 2012.

Selain menggunakan konsep Keamanan Nasional, peneliti juga menggunakan konsep Feminisme. Dari berbagai konsep feminisme yang telah disampaikan pada bab 2, peneliti menitikberatkan konsep Feminisme Sosial, yang menjadikan Argumen Perbedaan sebagai landasan terbentuknya konsep ini, dimana keterwakilan seorang perempuan dalam sistem pemerintahan sangat diperlukan karena cara pikirnya yang berbeda, yang jarang bisa dipikirkan oleh banyak kaum pria. Selain itu dalam konsep Feminisme Sosial, para kaum perempuan dianggap mampu menyelesaikan masalah dengan jalan dan pendekatan yang berbeda.

Pada tahun 2012, Park Geun-hye memenangkan pemilihan nasional dengan suara mayoritas seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pada saat itu *gender stereotype* masih sangat besar di Korea Selatan, ini dikarenakan konflik dengan Korea Utara, mayoritas publik Korea Selatan menganggap pemimpin laki-laki lebih baik untuk memimpin dan mengatasi masalah-masalah krusial seperti nuklir Korea Utara. Pada masa awal kepemimpinannya, Park Geun-hye menjalankan pemerintahannya didalam sensitifitas gender, dan dianggap tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau feminis, tidak lama setelah itu, Park Geun-hye menyampaikan kebijakannya yang lebih peduli dengan perempuan dan anak-anak. Salah satunya berjanji akan melibatkan banyak perempuan dalam pemerintahannya, serta

memberikan layanan publik yang mapan untuk perempuan dan anak-anak, mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja yang luas juga menjadi perhatian Park.

Berbicara tentang krisis nuklir Korea Utara, Setelah berbagai kebijakan yang berubah-ubah dari satu rejim ke rejim lainnya, Park Geun-hye kembali menggunakan pendekatan persuasif dalam upayanya menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara, berbeda dengan Lee Myung-bak yang lebih memilih politik konfrontatif, pada periode sebelumnya. Park Geun-hye dengan *Trust-politic Policy* -nya membawa harapan baru untuk kedua negara, dimana Park menggalakan konsep saling percaya satu sama lain agar terciptanya perdamaian dikawasan. Keunikan dalam *Trust-politic Policy* inilah yang menjadi karakteristik Park Geun-hye dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara. Dalam tujuan membangun kepercayaan di wilayah Semenanjung Korea (*Korean Peninsula trust process*), Park Geun-hye menginginkan tercapainya kepercayaan berkelanjutan antara Korea Selatan dengan negara-negara yang ada dikawasan, terutama Korea Utara. Didalam pilar ini, ada tiga langkah konkret untuk menciptakan perdamaian, diantaranya :

1. *Humanitarian Assistance For The Poverty-Stricken Ordinary People In North Korea*

Dalam level ini, Korea Selatan mengizinkan bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional seperti UNICEF masuk kedalam wilayah Korea Utara untuk membantu kelompok-kelompok rentan. Salah satu bentuk bantuan kemanusiaan ini adalah menyediakan

jasa asistensi untuk bayi yang baru lahir dan ibu hamil, tanpa menghiraukan ketegangan politik antar kedua negara (Byung. 2013: 9).

2. *Inter-Korean Exchanges And Cooperation In The Economic, Social, And Cultural Areas*

Salah satu pencapaian dalam proses normalisasi hubungan antar kedua negara bertetangga ini, dalam rangka membangun kepercayaan antara keduanya, dibuktikan dengan dibukanya kembali pusat industri bersama Kaesong ditapal batas kedaulatan dua negara, dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dikedua belah pihak. Zona industri bersama Kaesong merupakan pusat kegiatan industri bersama antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dibangun sejak lama di daerah Kaesong yang berbatasan langsung dengan wilayah Korea Selatan. Pada masa pemerintahan Park Geun-hye, pusat industri Kaesong diaktifkan kembali dengan menandatangani persetujuan bersama (*agreement*), dimana Korea Selatan meminta Korea Utara agar mematuhi standar internasional sekaligus memegang teguh kesepakatan yang sudah dicapai. Korea Selatan juga setuju untuk membuka kembali kerjasama perdagangan dan kegiatan ekspor-impor antar negara (Kang. 2014: 10). Dalam *Unification White Book*, kebijakan yang paling mendasar dalam proses *trust* adalah “*social capital*”. Selain membuka kembali *Kaesong Industrial Center* (KIC), proses unifikasi antara Utara dan Selatan juga melalui penyelenggaraan reuni untuk para keluarga yang terpisah tersebut, karena tidak sedikit keluarga yang tinggal di Korea Selatan

memiliki anggota keluarga di Korea Utara, dan sebaliknya (Kang. 2014: 7)

3. *'Vision Korea Project' For Establishing A Single Economic Community On The Korean Peninsula*

Dalam fase *trust process* pada level ini, adalah keberlangsungan atau finalisasi dari upaya denuklirisasi Korea Utara, dengan kata lain, kerjasama ekonomi tunggal ini akan tercipta setelah Korea Utara menghentikan kegiatan nuklirnya, membuka diri, dan dua poin *trust process* diatas sudah tercapai (Cheon. 2013: 3). Tentunya, kegiatan ekonomi ini tidak hanya antara Korea Utara dan Korea Selatan saja, melainkan negara-negara yang berada di semenanjung Korea, seperti Cina dan juga Jepang.

Dari ketiga pilar yang dikemukakan Park Geun Hye untuk menciptakan perdamaian, peneliti menggabungkan dengan konsep feminisme oleh Lovenduski yang menyebutkan tiga argumen:

1. Argumen Keadilan, dimana dalam argumen ini berisi mengenai ketidakadilan jumlah antara laki-laki dan perempuan di perwakilan pemerintahan, yang tentunya mayoritas adalah laki-laki. Namun dalam pilar perdamaian Park Geun Hye di atas pada pilar ke satu. Pada pilar perdamaian Park Geun Hye, Korea Selatan mengizinkan bantuan kemanusiaan dari UNICEF masuk ke dalam wilayah Korea Utara, yang mana hal itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa perempuan mampu melakukan hal-hal yang juga penting bagi negaranya dengan tujuan untuk

memenuhi kebijakan *Trust-politic Policy*. Sedangkan pada masa pemerintahan sebelum Park Geun Hye yang mayoritas Presiden adalah laki-laki, kebijakan yang dikeluarkan untuk Korea Utara lebih mengedepankan ego masing-masing kepala pemerintahan.

2. Argumen Pragmatis

Merupakan argumen yang berasal dari kepentingan. Dimana jumlah perempuan dalam partai politik merupakan perwakilan dirinya untuk mendukung peran perempuan di pemerintahan. Menurut peneliti, hal ini cocok dengan pilar perdamaian Park Geun Hye poin ke dua. Pada masa pemerintahan Park Geun Hye yang mengedepankan diplomasi sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan yaitu *Trust-politic Policy*. Presiden Park membuka kembali pusat industri Kaesong. Karena Presiden Park yakin bahwa untuk mewujudkan perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara salah satunya adalah melalui jalur ekonomi. Berbeda halnya pada masa pemerintahan sebelum Park, kebanyakan jalur ekonomi Korea Selatan ke Korea Utara akan ditutup dan tidak melakukan ekspor-impor antar Korea Selatan dan Korea Utara.

3. Argumen Perbedaan

Dalam argumen ini, perempuan dianggap kaum yang mampu membawa perubahan pada suatu negara. Hal ini peneliti kaitkan dengan pilar perdamaian Park Geun Hye pada poin ke tiga. Mengenai denuklirisasi Korea Utara. Masih sama yang dilakukan Korea Selatan mengenai denuklirisasi Korea Utara, yaitu dengan kebijakan “garis keras”

nya, namun berbeda dengan Park Geun Hye yang menggunakan kebijakan “garis lunak” nya dalam menghadapi denuklirisasi Korea Utara. Karena tujuan utama Park untuk Korea Utara adalah menciptakan zona perdamaian dengan melakukan “trust” kepada negara tetangga yaitu Korea Utara.

"Trustpolitik" does not mean unconditional or one-sided trust without verification. Nor does it mean forgetting North Korea's numerous transgressions or rewarding the country with new incentives. Instead, it should be comprised of two coexisting strands: first, North Korea must keep its agreements made with South Korea and the international community to establish a minimum level of trust, and second, there must be assured consequences for actions that breach the peace. To ensure stability, trustpolitik should be applied consistently from issue to issue based on verifiable actions, and steps should not be taken for mere political expediency. (Park. 2011)

Dalam kebijakan untuk membangun kepercayaan diwilayah Semenanjung Korea (*Korean Peninsula trust process*), Presiden Park Geun-hye memproklamirkan tiga prinsip unifikasi atau *Three principles of Unifications*. Sebelum lebih lanjut, peneliti ingin menjelaskan pengertian dari unifikasi. Mengacu pada *thesaurus.com*, *unification* memiliki padanan kata dengan *consolidation* atau *coalition* (*thesaurus.com*). Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, *unification* memiliki arti penggabungan atau penyatuan.

Dalam tiga prinsipnya, konsep unifikasi yang ingin dijalankan oleh administrasi Park Geun-hye adalah (1) penyatuan berbasis dukungan terhadap masyarakat diantara dua negara dan selalu bersama rakyat (*unification based on people's support and together with the people*), (2) penyatuan untuk membuat semua orang yang berada di Korea Selatan dan Korea Utara merasa bahagia. (*unification making every individual in North and South Korea happy*), dan (3) penyatuan dalam rangka berkontribusi dalam stabilitas, kerjasama dan perdamaian dikawasan Asia dan turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia (*unification contributing to Asian stability and cooperation and world peace*). Unifikasi merupakan landasan *Trust-politic Policy* dalam proses pelaksanaannya, kebijakan unifikasi yang telah peneliti paparkan diatas merupakan kebijakan yang diterapkan dalam level *people-to-people contact*.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa *Trust-politic Policy* yang dicanangkan oleh Park Geun-hye menjangkau aspek-aspek feminisme, ini terlihat dari kebijakan untuk mendukung perlindungan bayi yang baru lahir dan ibu-ibu hamil di wilayah Korea Utara, menciptakan rasa bahagia untuk semua kalangan masyarakat di Korea Selatan maupun Korea Utara, seperti melakukan pertemuan antar keluarga dari dua negara, menyelenggarakan kerjasama agrikultur, dan yang terakhir dengan membuka kembali *Kaesong Industry Center* (KIC) untuk keperluan ekonomi dan lapangan kerja bagi buruh antar dua negara bertetangga tersebut.

D. Ancaman Program Nuklir Korea Utara Terhadap Korea Selatan

Sebagai negara yang bertetangga langsung dengan Korea Utara, Korea Selatan merupakan negara yang paling rentan terkena imbas dalam kegiatan nuklir Korea Utara, terlebih lagi dua negara ini tidak dibatasi laut, melainkan hanya garis batas antar negara. Peneliti mengklasifikasikan 3 (tiga) bidang yang terpengaruh oleh kegiatan nuklir Korea Utara terhadap Korea Selatan, bidang-bidang tersebut diantaranya bidang ekonomi, bidang keamanan, serta yang terakhir merupakan bidang sosial budaya.

D.1. Bidang Ekonomi

Ekonomi merupakan bidang yang paling terkena imbas dari provokasi nuklir Korea Utara, lebih-lebih ketika uji coba senjata pemusnah massal tersebut dilakukan. Saat krisis nuklir Korea Utara melanda, banyak kegiatan ekonomi seperti investasi, saham dan kegiatan perdagangan, baik ekspor maupun impor yang dilakukan Korea Selatan tertunda untuk waktu yang tidak bisa ditentukan, lebih parahnya, pengaruh dari kegiatan nuklir Korea Utara mengakibatkan terputusnya jalur transportasi dan terhentinya kegiatan penerbangan (Noland. 2006:30)

D.2. Bidang Keamanan

Dalam bidang keamanan sudah jelas kegiatan nuklir Korea Utara mengancam negara-negara di kawasan Asia Timur khususnya negara tetangganya, Korea Selatan. Daya ledak, efek pengayaan bahan senjata nuklir, limbah dari kegiatan pembuatan senjata nuklir serta sasaran bidik dari senjata nuklir Korea Utara mengancam stabilitas dan keamanan Korea Selatan.

D.3. Bidang Sosial Budaya

Ancaman kegiatan nuklir Korea Utara memberikan efek pada masyarakat Korea Selatan, setiap peringatan dini ancaman nuklir Korea Utara, masyarakat Korea Selatan menyelamatkan diri dan menghentikan kegiatannya. Disamping itu, masyarakat Korea yang terpisah berpuluh tahun setelah kedua negara itu mengambil keputusan untuk berpisah, tidak dapat bertemu karena tensi antara kedua negara yang meningkat.

Dalam poin ini, peneliti memaparkan tentang ancaman-ancaman yang timbul ketika krisis nuklir Korea Utara terjadi. Peneliti membagi dalam tiga bagian, diantaranya ekonomi, keamanan dan sosial budaya. Dengan menggunakan pendekatan Teori Keamanan, kekuatan (*power*) merupakan faktor kunci, dengan mengedepankan kekuatan ekonomi bersamaan dengan kekuatan militer serta strategi keamanan. Saat krisis nuklir Korea Utara terjadi, kegiatan ekonomi di Korea Selatan terganggu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan ketika ancaman datang dari luar. Selain ekonomi, keamanan nasional dan kedaulatan negara otomatis menjadi salah satu aspek yang terancam dari kegiatan nuklir Korea Utara. Korea Selatan tentu merespon setiap krisis dengan mengedepankan kepentingan negaranya, termasuk keamanan. Disisi lain, sosial budaya sebagai nilai yang dianut oleh banyak masyarakat dari dua negara tersebut, ikut terancam karena kebijakan yang profokatif dari Korea Utara. Masyarakat yang memiliki hubungan darah, terpisah karena konflik dari dua negara. Korea Selatan tentu merespon ancaman nuklir Korea Utara dengan strategi keamanan dan kekuatan militer,

dengan kata lain konsep keamanan nasional menjadi penting dalam menanggulangi krisis nuklir Korea Utara yang konfrontatif.

E. Sikap Korea Selatan Terhadap Aktivitas Nuklir Korea Utara

Korea Selatan telah melakukan banyak pendekatan untuk menciptakan perdamaian dengan negara tetangganya. Berbagai cara dilakukan dari segi ekonomi, kegiatan kemanusiaan hingga militer. Ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara hampir terjadi disetiap pergantian kepemimpinan, karena kebijakan yang diambil setiap presiden berbeda-beda, peneliti akan memaparkan beberapa contoh kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam merespon provokasi nuklir Korea Utara.

E.1. Periode Kim Dae-jang (1998-2003)

Dalam kebijakan *Sunshine Policy* yang diterapkan oleh Kim Dae-jung, Korea Selatan kerap melakukan pendekatan yang persuasif melalui bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar, bantuan ekonomi hingga dialog-dialog yang memungkinkan Korea Utara agar patuh dan berperan aktif dalam menerapkan norma internasional.

E.2. Periode Roh Mou-Hyun (2003-2008)

Hampir sama dengan pendahulunya, Kim Dae-jang, Presiden Roh masih menerapkan *Sunshine Policy* dalam menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara. Banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan himbauan secara persuasif agar Korea

Utara ikut serta dalam menciptakan perdamaian didunia pada umumnya dan kawasan pada khususnya.

E.3. Periode Lee Myung-bak (2008-2013)

Pada tahun 2010, tepatnya pada kepemimpinan Lee Myung-bak, Korea Selatan menerapkan kebijakan yang tebilang keras dan cenderung kontradiktif dengan kebijakan yang sebelumnya diambil. Disisi lain, Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un memperlihatkan kebijakan yang agresif dan provokatif pula dalam rangka memperlihatkan kekuatannya (Kang. 2014: 1), ini dibuktikan dengan tragedi kapal perang Cheonan dan konflik di pulau Yeonpyeong. Pada Desember tahun 2012, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik jarak jauhnya, yang mendatangkan kekhawatiran didunia internasional, bersamaan dengan itu, Korea Utara juga melakukan konfrontasi politik dengan mengatakan Korea Selatan akan menjadi lautan api (Kang. 2014: 2),

E.4. Periode Park Geun-hye (2013-2017)

Berbeda dengan Lee Myung-bak yang menggunakan kebijakan yang cenderung keras terhadap Korea Utara, Park Geun-hye menerapkan kebijakan yang jauh lebih baik, setidaknya bagi para masyarakat yang sudah lelah dengan konflik berkepanjangan antar negara bertetangga tersebut. *Trust-Politik Policy* merupakan kebijakan yang mengedepankan kepercayaan, Park memulai membangun kepercayaan dengan melibatkan masyarakat dari Korea Selatan dan Korea Utara untuk turut serta dalam tujuan unifikasi dan kerjasama pembangunan. Selain yang

sudah dipaparkan diatas, Park Geun-hye melalui *Trust-Politik Policy*-nya mencerminkan kebijakan yang mendukung perempuan dan mengedepankan kerjasama dari pada politik konfrontasi.

F. Kegiatan nuklir Korea Utara

F.1. Krisis Nuklir I Korea Utara

Krisis nuklir di semenanjung Korea dimulai saat Korea Utara mencoba menginvasi Korea Selatan pada tahun 1949. Kim Il-sung, pada saat itu memimpin Korea Utara, meminta izin kepada Stalin untuk menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Korea Selatan. Pada awalnya Stalin menolak permintaan Kim Il-sung dua kali pada tahun 1949, namun mengizinkan rencana tersebut setahun setelahnya. Pada 25 Juni 1950, atas izin Stalin, suplai logistik dan *Air Support* dari Uni Soviet, Kim Il-sung melancarkan serangan mendadak kepada Korea Selatan yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar terhadap pertahanan militer Korea Selatan pada waktu itu (Perry. 2006 : 79-80).

Gambar 5: Park Il-sung dan Kim Koo pada tahun 1949 sesaat sebelum pecahnya Perang Korea



Sumber:<http://shindonga.donga.com/docs/magazine/shin/2010/02/03/201002030500001/20>

1002030500001_5.html] |Date=1948.04 |Author=Unknown |Permission={{PD-South Korea}}

|other_versions= }} diakses 14 Agustus 2019.

F.2. Krisis Nuklir II Korea Utara

Satu dekade setelahnya, tepatnya pada tahun 1960, Korea Utara kembali memberikan ancaman di Asia Timur. Uni Soviet memberikan fasilitas penelitian reaktor senjata nuklir serta memberikan pelatihan kepada para teknisi nuklir asal Korea Utara (Perry. 2006 : 81). Sepanjang tahun 1970an, Kim Il-sung meminta dukungan kepada Rusia dan Cina untuk membuat bom nuklir, sayangnya ditolak oleh kedua negara tersebut.

Gambar 6 : Yongbyon Nuclear Research Facility/ fasilitas nukler Yongbyon dimana fasilitas ini terdeteksi oleh satelit Amerika Serikat setelah Korea Utara mengatakan komitmennya untuk menghentikan kegiatan nuklirnya.



Sumber : Glimpse into Yongbyon nuclear complex

<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190228000534>, by Park Han-na. diakses 14 Agustus

2019

Pada tahun 1989, satelit Amerika Serikat menangkap citra pembangunan fasilitas nuklir Korea Utara didekat kora Yongbyon, Amerika Serikat kemudian berpendapat kalau Korea Utara sedang mempersiapkan fasilitas nuklirnya. Melalui Rusia dan Cina, Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk berkenan di inspeksi oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Namun beberapa bulan, tidak terlihat sikap kooperatif dari Korea Utara hingga Amerika Serikat memberikan tawaran akan menarik senjata nuklir taktisnya dari Korea Selatan. Akhirnya otoritas Korea Utara menyetujui inspeksi dari pihak IAEA.

F.3. Krisis Nuklir III Korea Utara

Empat tahun setelahnya, khususnya pada tahun 1994, AS terlibat kembali pada konflik di semenanjung Korea karena program nuklir Korea Utara. Fasilitas nuklir Yongbyon telah mencapai proses *fuel cycle* tahap terakhir, lalu Korea Utara menyatakan mengundurkan diri dari kelompok *non-proliferation Treaty* dan mengusir inspektur internasional perwakilan IAEA. Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan mengancam akan memberikan sanksi kepada Korea Utara jika tidak menghentikan kegiatan produksi plutonium. Pada krisis ketiga nuklir Korea Utara ini, Amerika Serikat dan sekutu menempuh jalur diplomatik, Kim Il-sung menyetujui kesepakatan melalui *diplomatic Agreement* yang kemudian lebih akrab di sebut *Agreed Framework*, dengan beberapa kesepakatan yang terdiri atas; Korea Selatan dan Jepang mendirikan *commercial light water reactor* untuk Korea Utara, dan Amerika Serikat menyuplai minyak hingga *light water reactor* selesai dibangun. Fasilitas nuklir Yongbyon dibekukan dari 1994 hingga 2002 (Perry. 2006 : 82).

Gambar 7 : Peta posisi nuklir Yongbyon, dan beberapa posisi fasilitas nuklir yang dimiliki Korea Utara



Sumber : <https://www.france24.com/en/20190228-yongbyon-north-korean-nuclear-complex-table-hanoi> diakses pada 23 Juni 2019.

F.4. Krisis Nuklir IV Korea Utara

Pada tahun 1998, Korea Utara membuat dua misil antar benua yang ditargetkan ke AS dan Jepang. Pembuatan misil antar benua ini meningkatkan tensi di regional Asia. Percobaan misil balistik Korea Utara mendarat di barat Hawaii, dan satu lagi mengarah ke Jepang. Kesepakatan diplomatik yang telah dibuat sebelumnya untuk menghentikan produksi plutonium telah dilanggar oleh Korea Utara, dan membuka kembali fasilitas nuklir Yongbyon. Bersama Jepang dan Korea Selatan, Amerika Serikat membuat strategi untuk menekan ancaman nuklir Korea Utara, pada saat percobaan misil balistik tersebut Korea Utara dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang menawarkan beberapa konsesi, seperti; jika Korea Utara menghentikan kegiatan nuklirnya dan

uji coba misil balistik antar benua, Amerika Serikat dan sekutu akan kembali membangun kerjasama ekonomi dan politik untuk menormalisasikan keadaan di internal Korea Utara, termasuk didalamnya “*permanent peace*”.

Gambar 8 : Arah percobaan roket bermuatan nuklir Korea Utara dari tahun 1998 hingga 2017, percobaan senjatanya lebih banyak diarahkan ke Jepang dan Samudera Pasifik



Sumber: DEFENSE OF JAPAN 2010, Section 2 Korean Peninsula. Dalam

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2010/10Part1_Chapter2_Sec2.pdf. Diakses pada 14

Agustus 2019

Namun, jika Korea Utara tidak menunjukkan sikap kooperatif, AS, Korea Selatan, Jepang dan sekutu lainnya akan mengambil tindakan represif (Perry. 2006 : 84). Dalam beberapa bulan, terlihat sikap Korea Utara yang kooperatif, ini ditandai dengan kunjungan pertama Korea Selatan dan Jepang ke Korea Utara untuk membahas kerjasama dan perdamaian diregional Asia Timur, kemudian Kim Jong-il menghadiri *Shanghai Stock Exchange* sebagai bentuk keterbukaan dirinya terhadap kegiatan internasional.

F.5. Krisis Nuklir V Korea Utara

Setelah kesepakatan yang telah dibuat dengan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, pada tahun 2002, Korea Utara memulai program nuklir lainnya secara diam-diam, program nuklir Korea Utara yang baru ini tidak lagi dilakukan di Yongbyong. Yang menarik dari krisis nuklir kelima Korea Utara ini adalah, program baru nuklir ini tidak menggunakan plutonium lagi, melainkan HEU atau *highly enriched uranium*, yaitu penguatan daya Uranium dengan melalui serangkaian pemisahan isotop. AS merespon kegiatan ini dengan menghentikan ekspor minyak ke Korea Utara, dan meminta Korea Selatan dan Jepang untuk menanggungkan kerjasama antara pihak mereka dengan Korea Utara.

Menanggapi konfrontasi keputusan kerjasama itu, Korea Utara membalas dengan mengusir inspektur IAEA dari Pyongyang, membuka kembali reaktor nuklirnya, dan mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya ((Perry. 2006 : 84-85). Hingga sembilan bulan berikutnya, tidak ada lagi dialog antara AS dan Korea Utara.

Gambar 5: Pencitraan lokasi reaktor light water setelah Korea Utara meminta dukungan kepada Amerika Serikat untuk penggunaannya, menggantungkan reaktor nuklir.



Sumber : Satellite image of the half-built light water reactor site in North Korea dalam <https://www.belfercenter.org/event/normalization-other-means-failed-techno-diplomacy-light-water-reactor-export-north-korean-0>, diakses 30 Juni 2019.

Dalam krisis nuklir Korea Utara kelima ini, Cina mulai turut campur dengan isu kawasan yang sudah menjadi ancaman dalam regional Asia Timur. Cina memaksa Korea Utara untuk melakukan perundingan multilateral, dengan menghadirkan beberapa negara, diantaranya; AS, Korea Selatan, Jepang, Cina, Rusia dan tentunya Korea Utara. Pada tahun 2005, setelah empat kali melakukan perundingan, baru pada saat perundingan ke empat, AS dan Korea Utara mencapai kesepakatan.

Dalam kesepakatan itu, tertulis kalau Korea Utara akan menutup kegiatan nuklirnya untuk keperluan militer, dan AS menyepakati keputusan tersebut. Satu hari setelah kesepakatan dicapai, AS dan Korea Utara menghadapi dilema pemahaman yang berbeda. Korea Utara berpendapat bahwa *light water reactor* yang dibuat oleh AS untuk Korea Utara seharusnya diberikan sebelum fasilitas nuklirnya dihentikan, sedangkan AS berpendapat bahwa *light water reactor* akan dibuat setelah fasilitas nuklir Korea Utara dihentikan. Setelah perselisihan pemahaman itu, Korea Utara mempercepat program nuklirnya, dalam waktu singkat setelah perselisihan itu, Korea Utara tercatat telah membuat delapan hingga sepuluh bom berkekuatan nuklir, membuka fasilitas nuklirnya di Yongbyon dan memproduksi Plutonium dalam jumlah besar.

Dari krisis nuklir Korea Utara pertama hingga krisis nuklir kelima, Korea Selatan sangat terlihat mempertahankan keutuhan negaranya dengan dengan sangat realistis, Keamanan nasional didasari atas kekhawatiran terhadap kekuatan yang ada disekitarnya, karena hal ini, Korea Selatan menjalin kerjasama dengan AS dan para sekutu, pada awal krisis nuklir Korea Utara pada tahun 1949, sedangkan Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Cina.

Korea Utara yang menganut paham komunis seperti para pendukungnya, mengancam nilai-nilai yang dipercaya oleh Korea Selatan, mengacu pada Teori Keamanan yang dijelaskan oleh Melvyn, dimana Keamanan Nasional adalah serangkaian kebijakan dan aksi yang dibuat guna melindungi nilai-nilai yang ada pada tiap Negara dari ancaman luar. Korea Selatan memutuskan meminta bantuan dari AS dan sekutu karena sadar akan kekuatan negaranya yang kecil, yang

menghadapi kekuatan gabungan tiga negara komunis. Disisi lain, Korea Selatan percaya bahwa nilai yang mereka anut terancam dengan konfrontasi Korea Utara bersama dengan kegiatan senjata pemusnah massalnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan *Trust-Politic Policy* ini juga sejalan dengan konsep feminisme menurut Lovenduski yang menyamakan feminisme dengan politik, yaitu :

1. *Humanitarian Assistance For The Poverty-Stricken Ordinary People In North Korea.*

Dengan cara memaksimalkan peran kerja perempuan Korea Selatan untuk melakukan bantuan kemanusiaan dari NGO lokal masuk ke wilayah Korea Utara.

2. *Inter-Korean Exchanges And Cooperation In The Economic, Social, And Cultural Areas.*

Dilakukan melalui pembukaan kembali Industri Kaesong yang merupakan pusat kegiatan industri bersama antara Korea Utara dan Korea Selatan. Diplomasi jalur ekonomi ini selain dilakukan untuk bisa membantu perekonomian kedua Negara juga untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Korea Utara.

3. *'Vision Korea Project' For Establishing A Single Economic Community On The Korean Peninsula*

Dengan tujuan untuk menghadapi denuklirisasi Korea Utara. Namun pada masa Park, Korea Selatan lebih menggunakan pendekatan garis lunak.

B. Saran

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu pada bab ini peneliti akan menyampaikan sekaligus memberikan beberapa peluang untuk para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas *Trust-Politic Policy* dimasa depan. Karena keterbatasan kemampuan Peneliti dalam hal pendalaman terhadap *Trust-Politic Policy* khususnya mengenaireunifikasi yang tertera dalam kebijakan tersebut, Peneliti berharap bisa dikembangkan melalui penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi

Andika Fajar Pratama Putra. 2016. *KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA UTARA DIBAWAH KEPEMIMPINAN KIM JONG UN DALAM PROLIFERASI NUKLIR TERHADAP KOREA SELATAN TAHUN 2013-2015*. JOM FISIP Vol. 3 No. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Haikal Hasan Thalib. 2013. *KEBIJAKAN PERTAHANAN KEAMANAN KOREA SELATAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NUKLIR KOREA UTARA ANTARA TAHUN 2002-2012*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Journal/Artikel

Amaritasari, Indah, (2015). “*Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional*”. 13 (Vol. I No. 2), 159-162.

Cheon, Seongwhun. “*Trust – The Underlying Philosophy Of The Park Geun-Hye Administration*,” Center of Strategic & International Studies, (Mei, 2013), hal.2-4.

Geun-hye Park. (2011). “*A New Kind of Korea: Building Trust between Seoul and Pyongyang*”. Foreign Affairs, Vol. 90, Issue 5.

Hahm, Sung Deuk, Uk Heo, (2017). “*The First Female President In South Korea : Park Geun-Hye’s Leadership And South Korean Democracy*”. (2017), 1-17.

Han, JuHui Judy. Jennifer Jihye Chun, “*Introduction: Gender And Politics In Contemporary Korea*,” Journal of Korean Studies, (2014), hal. 245-246.

Hawkesworth, Mary (1994). “*Policy Studies Within A Feminist Frame*”. 27 (1994), 97-118.

Ha Y, (2013). “*A comparison of the profile of Park Geun-hye and Xi Jinping: Foreign and security policy cooperation between ROK and PRC*”. Journal of Peace Studies 14(4): 134–162.

Jerry, W. J. (2006). “*Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises*”. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 607(1), 78–86.

- Kang, Stephanie Nayoung. (2014). "*Building Trust on the Korean Peninsula: An Assessment of Trustpolitik for Inter-Korean Relations*". Pacific Forum SCIS, 14(13).1-13.
- Kim, Hyung Joon. (2014). "*A Study on the Trend in Voting Behavior and Political Orientation of Female Voters: Focusing on the 2012 Korean Presidential Election.*" The Women's Studies 86 (1): 71–101.
- Leffler, Melvyn P, (1990). "*National Security*," University of Bath Library & Learning Centre, (1990), 145-147.
- Lee, Young Im. (2016). "*From first daughter to first lady to first woman president: Park Geun-Hye's path to the South Korean presidency*".Feminist Media Studies, 17(3).377–391.
- Noland, M. (2006). "*The Economic Implications of a North Korean Nuclear Test*".Asia Policy, 2(1), 25–39.
- Ruiz, Tricia. (2006). "*Feminist Theory and International Relations: The Feminist Challenge to Realism and Liberalism*". California State University Stanislaus.
- Siska Ayu Anggraini. 2018. "*Motivasi Park Geun-Hye Menerapkan Kebijakan Trust Politik Dalam Menghadapi Korea Utara Pada Tahun 2013-2016*". JOM FISIP Vol. 6: Edisi I. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Yun Byung, Se. (2013). "*Park Geun-hye's Trustpolitik - A New Framework for South Korea's Foreign Polic*". Global Asia, 8(3), 8–14.
- Youngmi, Kim. (2013). "*The 2012 parliamentary and presidential elections in South Korea*".Department of International Relations and European Studies, Central European University, 34(2014), 291–379.
- Young-Im, Lee, & Farida Jalalzai, (2017). "*President Park Geun-Hye of South Korea: A Woman President without Women?*".13 (2017), 597-617.

Thesis

Ihsan, Kurnia. 2017. *TRUST-POLITIK POLICY KOREA SELATAN SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN AGRESIVITAS NUKLIR KOREA UTARA*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Buku

Bakry, Umar Suryadi, (2006). *“Metode Penelitian Hubungan Internasional”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Lovenduski, Joni. *POLITIK BERPARAS PEREMPUAN*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI). 2008.

Milles, Jack & Roy, Huberman (1992). *“Analisis Data Kualitatif. 16 volumes”*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

E-Book

Watson, Cynthia Ann, (2008). *“U.S National Security: A Refence Handbook, Second Edition”*. California: ABC-CLIO.

Berkowitz, Morton, & Bock, P.G, eds, (1965). *“American National Security: A Reader In Theory And Policy”*. New York: Free Press.

Website

, *“North Korea’s Punggye-ri Nuclear Test Site: Analysis Reveals Its Potential for Additional Testing with Significantly Higher Yields”*, dalam <https://www.38north.org/2017/03/punggye031017/>. Diakses pada 24 April 2019.

<https://www.dictionary.com/browse/unification>. Diakses pada 20 Juni 2019.

Normalization by Other Means — The Failed Techno-diplomacy of Light Water Reactor Export in the North Korean Nuclear Crisis

Thu., Feb. 14, 2019 | 12:15pm - 2:00pm. Speaker: Christopher Lawrence, Postdoctoral Research Fellow, International Security Program/Project on Managing the Atom

Go, Sugho, and Young-Il Sohn. 20 Juli 2012. *“Park Geun-Hye, yeo-seong-jeong-chaek gong-yak 7ga-ji je-si, min-ju dae-seon-ju-ja 7in nyeo-seong-jeong-*

chi kaem-peu ji-pap[Park Proposes 7 Women-Friendly Policies (in Korean)]. “Donga Ilbo. Dalam <http://news.donga.com/rel/3/all/20120720/47906284/1>.Diakses 26 Agustus 2019.

<https://www.belfercenter.org/event/normalization-other-means-failed-techno-diplomacy-light-water-reactor-export-north-korean-0>

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI**

Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro Surakarta Telp. (0271) 853839

SURAT TUGAS MEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 188 / S4 / AK / 2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dengan ini menugaskan :

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : Setyasih Harini, S.IP. M.Si. |
| Pangkat/golongan | : Penata / III - C |
| Jabatan Akademik | : Lektor |
| Status | : Pembimbing Utama |
| 2. Nama | : Drs. GPH Dipokusumo, M.Si. |
| Pangkat/golongan | : Penata Muda / III - A |
| Jabatan Akademik | : Asisten Ahli |
| Status | : Pembimbing Pendamping |

Untuk MEMBIMBING SKRIPSI SARJANA bagi mahasiswa :

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| Nama | : Medika Widlaksmira |
| NIM / NPM | : 14430007 |
| Jurusan | : Ilmu Hubungan Internasional |

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Surakarta, 12 Oktober 2017

Dekan,


Dr. Buddy Riyanto, M.Si.
NIPY. 0191.0139.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro Surakarta Telp. (0271) 853839

Nomor : / I / FISIP / 2007

Lampiran : -

Hal : Undangan Seminar Proposal

Kepada Yth. : 1. Setyarah Harinu, S.IP, M.Si

2. Drs. GPH. Dipokutomo, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

Mohon dengan hormat kehadiran Bpk/Ibu besuk pada :

Hari / tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018

Pukul : 13.00

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Keperluan : Seminar Proposal

Atas nama mahasiswa :

Nama : Medika Kridilaksmira

NIM/NPM : 14430007

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Atas perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih.

Surakarta,

An. Dekan

Satgas,



Halifa Haggi, S.IP, M.Si

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI**

Jl. Sumpah Pemuda No.18 Joglo Kadipiro Surakarta Telp. (0271)857757

Noor : 32 / S4 / AK / 2019
Lampiran :
Perihal : Undangan Menguji Skripsi

Yth. : 1. Setyasih Harini, S.IP. M.Si.
2. Des GPH. Dipokusumo. M.Si.
3. Dra. Christy Damayanti, M.Si.

Dengan hormat,

Mohon Kehadiran Saudara besok pada :

Hari/Tgl. : Kamis, 22 Agustus 2019
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Fisip
Keperluan : Menguji Skripsi
Nama : Medika Widilakmira
NPM : 14430007
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional.

Atas Perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih

Surakarta, 20 Agustus 2019
Dekan,



Drs. Bddy Rivanto, M.Si.
NIP. 0191. 0139.